

Buku ini berisi kombinasi teoretik dan perkembangan hukuman penjara/pemidanaan, serta regulasi terupdate pemasyarakatan yang terdiri dari 10 pembahasan utama. Dimulai dari pengenalan penologi, sejarah penghukuman, dan pembaruan sistem pemenjaraan. Kemudian dijabarkan perkembangan awal hukum pemasyarakatan di Indonesia, mengupas tujuan dan pedoman pemidanaan disertai tujuan dan asas sistem pemasyarakatan. Selanjutnya, perihal penyelenggara dan subjek sistem pemasyarakatan, hak dan kewajiban tahanan, anak dan warga binaan, serta membicarakan fungsi pemasyarakatan dan kerja sama, partisipasi dan reintegrasi sosial. Dua bab terakhir fokus pada grasi, abolisi dan amnesti, serta daya upaya menekan *overcrowded*.



Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berasal dari Belitung Timur. Pendidikan terakhirnya diraih di PDIH Universitas Diponegoro. Aktif menulis opini, prosiding, dan jurnal serta buku, di antaranya *Memahami Hukum Lebih Kritis* (2009), *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn* (2012), *Pengantar Hukum Pertambangan Minerba* (2018), dan *Pengantar Kriminologi* (2022).



Ndaru Satrio, S.H., M.H. Kelahiran Banyumas tahun 1987 dan meraih Magister Hukum dari Universitas Jenderal Soedirman. Memulai karier dosen di FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Kini mengabdikan di FH Universitas Bangka Belitung dan telah menghasilkan beberapa karya buku, seperti *Politik Hukum Era Jokowi*, *Hukum Tidak Selalu Tegak*, *Hukum Acara Pidana*, dan *Pengantar Kriminologi*.



Kampus Terpadu UBB, Jln. Raya
Balunujuk, Kec. Merawang, Bangka,
Prov. Kep. Bangka Belitung
tp3ubb@gmail.com



ISBN 978-623-8476-12-7



9

786238

698127



PENGANTAR PENOLOGI dan PEMASYARAKATAN

Dwi Haryadi
Ndaru Satrio

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
BAB 1. PENOLOGI, SEJARAH PENGHUKUMAN DAN PEMBARUAN SISTEM PEMENJARAAN	1
A. Pengertian.....	2
B. Penologi Bagian dari Kriminologi.....	2
C. Sejarah Penghukuman	3
D. Titik Awal Pembaruan Penjara.....	5
E. Beberapa Sistem Pemenjaraan.....	6
BAB 2. PERKEMBANGAN AWAL HUKUM PEMASYARAKATAN DI INDONESIA	9
BAB 3. TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN.....	15
BAB 4. TUJUAN DAN ASAS SISTEM PEMASYARAKATAN	21
BAB 5. PENYELENGGARA DAN SUBJEK SISTEM PEMASYARAKATAN	29
BAB 6. HAK DAN KEWAJIBAN TAHANAN, ANAK DAN WARGA BINAAN	35
A. Hak dan Kewajiban Tahanan	36
B. Hak dan Kewajiban Narapidana	37
C. Hak dan Kewajiban Anak, Anak Binaan dan Klien	40
BAB 7. FUNGSI PEMASYARAKATAN	43
A. Pelayanan	44

B. Pembinaan.....	48
C. Pembimbingan Kemasyarakatan.....	53
D. Perawatan.....	54
E. Pengamanan	56
F. Pengamatan	58
G. Intelijen Pemasyarakatan	59
H. Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Pemasyarakatan	60
BAB 8. KERJA SAMA, PARTISIPASI DAN REINTEGRASI SOSIAL	63
A. Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat	64
B. Reintegrasi Sosial.....	65
C. Penyesuaian Diri Mantan Narapidana.....	69
BAB 9. GRASI, ABOLISI DAN AMNESTI	73
A. Grasi	75
B. Abolisi	78
C. Amnesti	80
BAB 10. DAYA UPAYA MENEKAN OVERCROWDED	83
A. Lapas (Selalu) Penuh	84
B. Hulu Hilir Menekan <i>Overcrowded</i>	87

C. Telaah Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 dan Perubahannya tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat	92
DAFTAR PUSTAKA	100
BIODATA PENULIS	104

BAB 1. PENOLOGI, SEJARAH PENGHUKUMAN DAN PEMBARUAN SISTEM PEMENJARAAN

